

SKRIPSI

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KOMPARATIF DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018-2022

SEFHIA MAHDINA QUR`ANI. S

A011191115



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

SKRIPSI

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KOMPARATIF DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018-2022

Sebagai salah satu persyaratan untuk
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh
SEFHIA MAHDINA QUR`ANI. S
A011191115



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

SKRIPSI

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KOMPARATIF DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018-2022

Disusun dan diajukan oleh :

SEFHIA MAHDINA QUR'ANI. S
A011191115

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 28 November 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



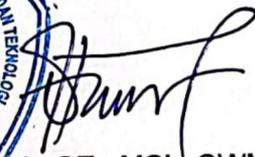
Prof. Muhammad Amri, Ph. D., SE., MA
NIP. 19660118 199002 1 001



M. Agung Ady Mangilep, SE., M.Si
NIP. 19740315 200312 1 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sabir, SE., MSi., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

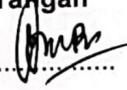
ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KOMPARATIF DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018-2022

Disusun dan diajukan oleh :

SEFHIA MAHDINA QUR'ANI. S
A011191115

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **28 November 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Tim Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Muhammad Amri, SE., MA., Ph.D.	Ketua	1. 
2.	M. Agung Ady Mangilep, SE., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Hamrullah, SE., M.Si., CSF.	Anggota	3. 
4.	Salman Samir, SE., M.Sc	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM@
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sefhia Mahdina Qur`ani.S
Nomor Pokok : A011191115
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Analisis Sektor Unggulan Komparatif Dan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2022*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 November 2023

Yang Menyatakan



Sefhia Mahdina Qur`ani.S

A011191115

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “***Analisis Sektor Unggulan Komparatif Dan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2022***” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan bentuk pemenuhan syarat untuk menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis dengan senang hati menerima setiap kritik dan saran dari pembaca terkait tulisan ini. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung penulis secara penuh. Untuk itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Allah SWT atas kehendak dan kemurahan-Nya memberikan penulis kelancaran serta kemudahan pada setiap proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Kedua orangtua penulis, Ayahanda Sabtiar serta Ibunda Aisyah yang dalam ketulusan dapat menjadi teladan bagi penulis dan menjadi orangtua yang selalu mendidik, memotivasi dengan penuh cinta kasih. Terimakasih atas segala kepercayaan, restu dan doa yang tidak pernah putus sehingga memudahkan penulis dalam menghadapi setiap tahap kehidupan.
3. Bapak Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM® selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Fitriwati Djam`an, S.E., M.Si. selaku sekretaris

Departemen Ilmu Ekonomi. Terimakasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.

4. Bapak Prof. Muhammad Amri,S.E., M.A., Ph.D. selaku penasihat akademik sekaligus pembimbing I dan Bapak M. Agung Ady Mangilep,SE., M.Si. Selaku pembimbing II. Terimakasih untuk setiap kritik,saran serta kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Hamrullah,SE., M.Si., CSF dan Bapak Salman Samir,SE.,M.Sc selaku dosen penguji, terimakasih untuk pertanyaan-pertanyaan serta kritik dan saran membangun yang disampaikan pada saat seminar proposal dan ujian skripsi, dari hal tersebut penulis banyak memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru.
6. Seluruh Dosen departemen Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan,dan nasehat kepada Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
7. Teman-teman GRIFFINS terimakasih telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan. Penulis merasa bersyukur dipertemukan dengan teman-teman GRIFFINS untuk melewati suka-duka perkuliahan.
8. Teman-teman pengurus HIMAJIE Kabinet PRIORITAS dan Kabinet MEMBARA atas kerjasama, kekompakkan, dan keceriaan selama masa kepengurusan. Serta secara khusus kepada Departemen Pengaderan periode 2022, terima kasih telah bersama-sama berjuang menyelesaikan kepengurusan meskipun banyak duka namun dilalui dengan baik dan penuh canda tawa.

9. Kepada keluarga besar HIMAJIE FEB-UH terimakasih telah menciptakan momen-momen berharga dalam HIMAJIE yang akan selalu dikenang. Serta banyak ilmu yang penulis dapat selama berada di Rumah Merah HIMAJIE.
10. Kepada Generasi Baru Indonesia sebagai komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia, terimakasih telah membawa saya mengenal banyak hal-hal baru. Khususnya teman-teman dari Deputi Lingkungan Hidup GenBI Unhas periode 2022-2023, terima kasih atas dedikasi waktu dan kerja kerasnya menyelesaikan program kerja hebat kita dan momen bahagia yang kita lalui di Pinrang, Bakaru, hingga kita *camping* bersama salam Lebih Dekat Lebih Intim.
11. Kepada teman-teman seperjuangan sejak SMA hingga saat ini, terima kasih atas persahabatan dan kebaikannya selama ini.
12. Kepada seluruh teman-teman KKN 107 Takalar dan warga Desa Bontoloe, terima kasih atas pengalaman berharga dan momen yang paling mengesankan bagi penulis.
13. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 30 November 2023

Sefhia Mahdina Qur`ani. S

ABSTRAK

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN KOMPARATIF DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018-2022

Sefhia Mahdina Qur`ani. S
Muhammad Amri
M. Agung Ady Mangilep

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor basis dan non basis komparatif dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder data yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Provinsi Papua Barat dan Angkatan Kerja (AK) menurut lapangan usaha di Provinsi Papua Barat tahun 2018-2022. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Location Quotient* (LQ) Sektoral dan Tenaga Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) dari 17 sektor ekonomi terdapat 2 (dua) sektor basis dimana LQ Sektoral >1 dan LQ Tenaga Kerja >1 yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Kata Kunci: PDRB, Location Quotient, Sektor Basis Ekonomi

ABSTRACT

ANALYSIS COMPARATIVE LEADING SECTORS AND LABOR ABSORPTION IN WEST PAPUA PROVINCE 2018-2022

Sefhia Mahdina Qur`ani. S
Muhammad Amri
M. Agung Ady Mangilep

This research aims to analyze the base and non-base comparative sectors and labor absorption in West Papua Province. The data used is secondary data, namely Gross Regional Domestic Product (GRDP) on the basis of constant prices according to business fields in West Papua Province and Labor Force according to business fields in West Papua Province in 2018-2022. The data analysis method used in this research is Sectoral and Labor Location Quotient (LQ). The research results show that based on the Location Quotient (LQ) analysis of 17 economic sectors, there are 2 (two) basic sectors where the Sectoral LQ is >1 and the Labor LQ is >1 , namely the Mining and Quarrying Sector and the Public Administration & Defence; Compulsory Social Security Sectors.

Keywords: GRDP, Location Quotient, Economic Base Sector

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pembangunan Ekonomi Daerah.....	9
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	11
2.1.3 Teori Basis Ekonomi	13
2.1.4 Keunggulan Komparatif	15
2.1.5 Penyerapan Tenaga Kerja.....	16
2.2 Studi Empiris	18
2.3 Kerangka Pikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	23
3.2 Lokasi Penelitian	23
3.3 Jenis dan Sumber Data	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.5 Metode Analisis Penelitian.....	24
3.5.1. Metode Analisis <i>Location Quotient</i>	24
3.6 Definisi Operasional Variabel	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum Provinsi Papua Barat	29
4.2 Tinjauan Perekonomian di Provinsi Papua Barat.....	30
4.3 Hasil.....	33
4.3.1 Analisis <i>Location Quotient</i> (Sektoral)	33
4.3.2 Analisis <i>Location Quotient</i> (Tenaga Kerja).....	35
4.4 Pembahasan	37
4.4.1 Sektor Unggulan Komparatif di Provinsi Papua Barat	37
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 PDRB ADHK (miliar rupiah) dan Jumlah Tenaga Kerja (jiwa) Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2022.....	5
Tabel 4.2 Kabupaten/Kota, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat	29
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Barat.....	30
Tabel 4.3 Peranan Distribusi PDRB Provinsi Papua Barat.....	31
Tabel 4.4 PDRB Perkapita Provinsi Papua Barat	32
Tabel 4.5 Klasifikasi Hasil LQ Sektoral Provinsi Papua Barat	33
Tabel 4.6 Klasifikasi Hasil LQ Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat.....	35
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan LQ Sektoral dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian.....	22
Gambar 4.1 Perkembangan LQ Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan..	38
Gambar 4.2 Perkembangan LQ Sektor Pertambangan dan Penggalian	40
Gambar 4.3 Perkembangan LQ Sektor Industri Pengelola.....	41
Gambar 4.4 Perkembangan LQ Sektor Pengadaan Listrik dan Gas.	42
Gambar 4.5Perkembangan LQ Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.....	44
Gambar 4.6 Perkembangan LQ Sektor Konstruksi.....	45
Gambar 4.7 Perkembangan LQ Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.....	46
Gambar 4.8 Perkembangan LQ Sektor Transportasi dan Pergudangan	47
Gambar 4.9Perkembangan LQ Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	49
Gambar 4.10 Perkembangan LQ Sektor Informasi dan Komunikasi.....	50
Gambar 4.11 Perkembangan LQ Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	51
Gambar 4.12 Perkembangan LQ Sektor Real Estate	52
Gambar 4.13 Perkembangan LQ Sektor Jasa Perusahaan	53
Gambar 4.14 Perkembangan LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.....	54
Gambar 4.15 Perkembangan LQ Sektor Jasa Pendidikan	55
Gambar 4.16 Perkembangan LQ Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial .	56
Gambar 4.17 Perkembangan LQ Sektor Jasa lainnya	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai cabang ekonomi yang menitikberatkan pada kegiatan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang sedang direncanakan pemerintah tentunya diharapkan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Harapan dari pembangunan ekonomi adalah dapat berlangsung secara terus menerus dan bergerak dengan dinamis (Aliakbar & Wildan, 2019).

Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses kenaikan pendapatan perkapita daerah dalam jangka panjang. Faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah adanya permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga sumber daya lokal berpotensi menghasilkan pendapatan daerah sekaligus dapat menciptakan peluang kerja di daerah. Hal ini berarti bahwa sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia memegang peranan yang sangat strategis dalam perekonomian daerah. Sumber daya lokal yang merupakan potensi ekonomi harus dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemampuan daerah dalam meningkatkan perekonomian dapat dilihat pada tingkat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di masing-masing daerah (Arsyad, 1999).

PDRB berperan penting untuk mengukur ekonomi, struktur ekonomi, dan

berbagai indikator tingkat kemakmuran. Potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia suatu daerah apabila sudah dioptimalkan pemanfaatannya maka akan sangat berpengaruh untuk meningkatkan PDRB. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan peningkatan produksi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan PDRB pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten. Kedua indikator pertumbuhan ekonomi ini tentunya memiliki keterkaitan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan ekonomi nasional pasti akan memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi tingkat provinsi (Rajab dan Rusli, 2019).

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, makmur dan berkeadilan. Pembangunan nasional mempengaruhi pembangunan daerah karena merupakan bagian dari suatu negara. Indonesia merupakan negara kesatuan dan rencana pembangunan meliputi rencana nasional dan rencana daerah. Pembangunan nasional berdampak pada struktur ekonomi nasional dan struktur ekonomi daerah, misalnya pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan industri telah mendorong peningkatan efisiensi industri di tingkat nasional dan daerah.

Pertumbuhan ekonomi sebagai pertimbangan sebagai tinjauan terkait adanya peningkatan pembangunan pada sebuah daerah yang terdiri dari beberapa sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan struktur ekonomi pada daerah tersebut. Proses laju pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dapat melalui adanya PDRB yang mengalami pertumbuhan, maka dengan adanya pertumbuhan sering juga digunakan untuk parameter keberhasilan dalam pembangunan perekonomian pada suatu wilayah (Astuti & Hidayat, 2022).

Potensi yang dimiliki tiap daerah di Indonesia beragam serta punya keuntungan dan kelemahan masing-masing. Sehingga kegiatan ekonomi yang dimiliki daerah merujuk pada potensi sektor-sektor perekonomian yang dimiliki dibagi menjadi dua kelompok yakni sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah semua kegiatan yang mendatangkan uang atau pendapatan dari luar daerah dengan ekspor barang dan jasa. Sedangkan sektor non basis adalah semua kegiatan ekonomi yang diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi lokal.

Dengan diketahuinya sektor-sektor yang bisa menjadi penggerak utama (sektor basis) perekonomian guna menciptakan keuntungan bagi sektor-sektor ekonomi lainnya, di mana apabila ada perhatian serius dari pihak-pihak terkait untuk terus memacu sektor-sektor basis tentu akan juga memacu kinerja sektor-sektor perekonomian lain untuk terus bertumbuh dan tercipta lapangan kerja yang akan menyerap tenaga kerja secara tepat. Oleh karena itu dengan mengetahui sektor-sektor yang bisa menjadi penggerak utama (sektor basis) juga sektor-sektor lainnya pemerintah daerah dapat mengarahkan para pencari kerja agar lebih tepat dalam penyerapan tenaga kerja sesuai sektor-sektor yang membutuhkan tenaga kerja sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja secara tepat. Penyerapan tenaga kerja yang semakin baik setiap tahunnya, akhirnya membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera (Lapong, Kindangen, dan Walewangko, 2018).

Faktor tenaga kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembangunan. Semakin produktif tenaga kerja berdampak pada peningkatan nilai tambah yang dihasilkan. Selain pasar uang dan pasar barang, pasar tenaga kerja juga menentukan bekerjanya suatu sistem ekonomi dalam pembangunan (Maryanti dan Rasyad, 2015).

Suatu daerah dikatakan memiliki sektor unggulan jika sektor tersebut memiliki keunggulan secara komparatif dengan sektor lain di daerah lain serta memberikan keuntungan atau manfaat yang besar. Suatu sektor ekonomi di suatu wilayah dinyatakan memiliki keunggulan komparatif jika memiliki suatu produk atau komoditif yang relatif lebih unggul dibandingkan produk yang sama dari sektor ekonomi wilayah lainnya. Keunggulan komparatif bersifat dinamis. Suatu negara yang memiliki keunggulan komparatif di sektor tertentu secara potensial harus mampu mempertahankan dan bersaing dengan negara lain (Raharjo, Ismiyati, dan Jaenudin, 2023).

Untuk itu perlu adanya pengembangan sektor unggulan suatu daerah karena dinilai mampu melihat potensi daerah yang berdampak terhadap kinerja ekonomi wilayah. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi tidak hanya dapat mengganggu stabilitas keamanan tetapi juga stabilitas politik, sebab pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya. Maka dari itu pemerintah harus mengembangkan kinerja ekonomi sesuai sumberdaya yang dimiliki (Maryanti dan Rasyad, 2015).

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terbentuk dari pemekaran dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999. Secara Geografis Papua Barat terletak di ujung barat Pulau Papua mencakup Semenanjung Bomberai dan Wandamen. Provinsi yang beribukotakan Manokwari terdiri atas 12 Kabupaten dan 1 Kota. Jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat sebanyak kurang lebih 1.183.307 jiwa dan luas wilayah Papua Barat berupa daratan seluas 102.955,15 kaya akan sumberdaya alam dan pesona alam yang

eksotis. Provinsi ini memiliki sumber daya utama yaitu pertambangan yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintahan dan masyarakat Provinsi Papua Barat. Hasil pertambangannya berupa minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, dan lain-lain (BPS Papua Barat).

Tabel 1. 1 PDRB ADHK (miliar rupiah) dan Jumlah Tenaga Kerja (jiwa) Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2022

	TAHUN									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	PDRB	TK								
1	6,058.67	140,447	6,273.10	133,257	6,122.47	148,845	6,182.41	158,112	6,187.07	188,481
2	11,541.13	6,434	11,489.69	8,712	11,487.65	7,868	11,549.84	7,512	11,960.15	8,859
3	19,032.38	27,814	18,843.49	16,968	19,194.62	23,347	18,752.24	23,205	19,299.25	20,375
4	21.68	919	23.61	2,527	25.71	1,355	28.41	1,747	30.59	1,336
5	67.34	1,564	72.49	1,409	74.03	751	77.03	1,267	76.5	523
6	7,694.87	24,881	8,277.31	30,987	7,704.83	27,842	7,478.36	27,936	7,272.23	29,170
7	3,953.65	62,863	4,284.64	73,205	4,327.59	81,275	4,430.11	87,620	4,644.52	69,746
8	1,561.47	27,785	1,686.59	24,770	1,418.03	25,080	1,379.07	25,746	1,451.56	28,440
9	332.19	11,490	357.67	14,972	340.18	19,124	352.71	14,628	397.77	15,477
10	1,151.94	1,660	1,284.55	3,065	1,407.82	2,137	1,411.48	2,860	1,449.10	2,907
11	809.59	5,402	885.1	6,225	950.38	2,959	979.36	3,253	978.32	4,051
12	727.72	216	788.96	187	781.34	435	801.22	304	835.45	34
13	67.42	3,848	70.98	4,627	67.82	5,277	66.35	7,761	69.68	5,075
14	5,273.55	61,857	5,447.56	58,292	5,431.68	59,023	5,469.23	66,488	5,516.07	59,758
15	1,531.43	20,492	1,620.23	27,292	1,572.79	25,660	1,581.58	27,903	1,595.37	25,092
16	474.56	10,147	495.37	12,102	525.5	12,175	571.04	11,982	569.82	12,136
17	165.94	9,725	173.19	14,801	171.68	16,197	178.97	15,357	184.95	16,245
TOTAL	60,465.52	417,544	62,074.52	433,401	61,604.13	459,350	61,289.40	483,681	62,518.38	487,705

Catatan:

*)1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Pengadaan Listrik dan Gas; 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6. Konstruksi; 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. Transportasi dan Pergudangan; 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. Informasi dan Komunikasi; 11. Jasa Keuangan

dan Asuransi; 12. Real Estat; 13. Jasa Perusahaan; 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15. Jasa Pendidikan; 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan 17. Jasa Lainnya. (BPS Provinsi Papua Barat)

Dari tabel 1.1 di atas, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Barat mengalami kenaikan selama periode 2018-2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemic covid-19 hingga berhasil bangkit kembali selama 2 tahun terakhir. Sektor yang memiliki 3 sektor teratas pada PDRB Provinsi Papua Barat adalah sektor Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, dan Konstruksi. Sedangkan sektor dengan nilai terendah adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas.

Akan tetapi jika melihat jumlah tenaga kerja tertinggi selama periode 2018-2022 dimiliki sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dari tabel 1.1 menunjukkan sektor-sektor yang dianggap unggulan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang bekerja. Terdapat juga sektor yang berkontribusi kecil memiliki jumlah penduduk yang bekerja lebih besar dari kontribusi PDRBnya. Hal ini menimbulkan fenomena apakah sektor unggulan dapat diukur hanya dari kontribusi PDRB saja dan dianggap benar-benar mampu menyerap tenaga kerja dan dapat dikembangkan untuk tahun mendatang.

Melihat kondisi ini, diperlukan satu langkah atau strategi tepat yang dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan mempertimbangkan perlunya peningkatan sektor unggulan di daerah yang bersangkutan secara maksimal dan efisien. Karena sektor unggul tersebut diharapkan mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan berpengaruh dalam penyerapan tenaga kerja (Kurniawan, 2018).

Agar dapat memenuhi harapan tersebut, maka pelaksanaan

pembangunan harus dimulai berdasarkan prioritas dan pengidentifikasian sektorsektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif yang berdampak positif untuk meningkatkan perekonomian daerah. Untuk mengidentifikasi hal tersebut maka dilakukan berbagai pendekatan model perencanaan pembangunan untuk menentukan arah dan kebijakan yang diambil, salah satunya yaitu pendekatan sektoral. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sektor Unggulan Komparatif dan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor apa saja yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Provinsi Papua Barat periode 2018-2022?
2. Sektor apa saja yang menjadi sektor basis dan non basis dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat periode 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Provinsi Papua Barat periode 2018-2022; dan
2. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat periode 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penjelasan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah untuk menjadi acuan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi;
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai hal berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu mencakup potensi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerahnya (Steeva, 2018).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya financial dan bahkan sumberdaya kelembagaan. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Vera dkk, 2019).

Kesejahteraan masyarakat diperoleh dari pengembangan wilayah yang dilakukan dengan cara pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan saat ini sudah menjadi tujuan dalam pembangunan dan pengembangan kota/kabupaten di Indonesia.

Daerah mempunyai peran strategis dalam pembangunan wilayah yang mempunyai hubungan ke belakang dengan kota-kota kecil dan juga hubungan ke depan dengan kota-kota besar lainnya. Meskipun sumber daya alam yang tersedia di perkotaan terbatas, namun kota sebagai pusat produksi barang dan jasa mampu memberikan layanan yang kompetitif.

Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang ada. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu dengan yang lain. Beberapa teori pembangunan daerah antara lain (Steeva, 2018) :

- 1) Teori Ekonomi Neo Klasik, teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan daerah yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor-faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah jika modalnya bisa mengalir tanpa restriksi atau pembatasan. Biasanya modal akan mengalir dari daerah yang mempunyai upah yang tinggi ke daerah dengan upah yang rendah;
- 2) Teori Basis Ekonomi, teori ini menyatakan bahwa faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa

perekonomian daerah dibagi menjadi dua yaitu (a) Sektor basis : sektor perekonomian yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan kebutuhan daerah lain maupun ekspor (b) Sektor non basis : sektor perekonomian yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi daerah sendiri;

- 3) Teori Lokal, lokasi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan pengembangan kawasan industri;
- 4) Teori Tempat Sentral, teori ini menganggap bahwa ada hirarki tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya. Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya;
- 5) Teori Kausasi Kumulatif, kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk merupakan konsep dasar dari teori kausatif kumulatif. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut. Daerah yang maju akan mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah yang terbelakang; dan
- 6) Teori Daya Tarik Industri, dalam teori ini dinyatakan bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan insentif.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut BPS Papua Barat (2022), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga

berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Secara konseptual perhitungan PDRB menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Produksi, Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha (sektor).
- 2) Pendekatan Pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto adalah besaran nilai produk barang dan jasa (output) yang dihasilkan di dalam suatu daerah untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Non-profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (merupakan ekspor dikurang impor).

Pendekatan Pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Dijelaskan lebih lanjut oleh BPS bahwa penyajian data Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) dibagi menjadi dua cara sebagai berikut:

- 1) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan penyajian yang dilakukan dengan cara menentukan kekuatan sumber daya ekonomi yang diperoleh suatu wilayah yang diperoleh melalui penilaian produk barang dan jasa berupa pengeluaran ataupun pendapatan dalam jangka waktu satu tahun yang berasal dari penilaian produksi dan biaya ataupun dari penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- 2) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan penilaian riil yang dihasilkan dan dikonsumsi dalam bentuk barang dan jasa atas harga konstan pada tahun dasar serta dilakukan dengan tujuan untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi secara total atau masing-masing kategori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk berbagai tujuan tetapi paling utama adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor netto.

2.1.3 Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi adalah salah satu teori ekonomi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, teori tersebut menyatakan, “faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah”. Teori basis ekonomi biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan sektor unggulan. Ketika sektor unggulan tersebut dikembangkan dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang pada akhirnya pengaruh tersebut dapat meningkatkan pendapatan

daerah secara optimal. Tumbuh atau tidaknya suatu daerah dan seberapa cepat atau tidaknya daerah itu tumbuh ditentukan oleh bagaimana kinerja daerah tersebut dalam mengeksport hasil sektor yang menjadi unggulannya ke daerah lain atau sampai ke luar negeri. Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis.

Menurut Arsyad (2016) teori ekonomi basis menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Lebih lanjut dalam analisisnya, teori basis biasanya digunakan untuk identifikasi dan menentukan sektor unggulan. Apabila sektor unggulan tersebut dikembangkan dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. (Tarigan, 2005). Dengan munculnya teori basis akan mendorong wilayah – wilayah dalam memacu pertumbuhan ekonomi di masing – masing wilayahnya, sehingga selain dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya namun juga dapat menjual ke luar wilayahnya, meskipun dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat tergantung pada aspek keunggulan maupun daya saing sektor ekonomi di wilayahnya masing - masing. Dalam hal ini dengan kemampuan untuk mengirimkan barang ataupun jasa keluar, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat dalam wilayah tersebut dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di wilayahnya sehingga dapat menambah PDRB, dengan bertambahnya PDRB maka pendapatan daerah akan meningkat sehingga mampu meningkatkan kebutuhan pembangunan yang diperlukan, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Analisis sektor basis dan non basis pada umumnya didasarkan atas nilai tambah ataupun lapangan kerja. Misalnya, penggabungan lapangan kerja basis dan lapangan kerja nonbasis merupakan total lapangan kerja yang tersedia untuk wilayah tersebut. Demikian pula penjumlahan pendapatan sektor basis dan pendapatan sektor nonbasis merupakan total pendapatan wilayah tersebut. Didalam suatu wilayah saat dihitung berapa besarnya lapangan kerja basis dan lapangan kerja nonbasis, dan apabila kedua angka itu dibandingkan, dapat dihitung nilai rasio basis (base ratio) dan kemudian dapat dipakai untuk menghitung nilai pengganda basis (base multiplier).

2.1.4 Keunggulan Komparatif

Konsep daya saing berpijak dari konsep keunggulan komparatif yang pertama kali dikenal dengan model Ricardian. Hukum keunggulan komparatif (The Law of Comparative Advantage) dari Ricardo menyatakan bahwa sekalipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi dua jenis komoditas jika dibandingkan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih bisa berlangsung, selama rasio harga antar negara masih berbeda jika dibandingkan tidak ada perdagangan. Ricardo menganggap keabsahan teori nilai berdasar tenaga kerja (labor theory of value) yang menyatakan hanya satu faktor produksi yang penting yang menentukan nilai suatu komoditas yaitu tenaga kerja. Nilai suatu komoditas adalah proporsional (secara langsung) dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk

menghasilkannya. Salah satu kelemahan teori Ricardo adalah kenapa tenaga kerja adalah satu-satunya faktor produksi, kenapa output persatuan input tenaga kerja dianggap konstan, dan tenaga kerja hanya dipandang sebagai faktor produksi.

Keunggulan komparatif merupakan sebuah konsep penting dalam teori ekonomi. Konsep keunggulan komparatif dapat menggambarkan bagaimana perdagangan antar negara. Dengan konsep ini, tiap negara akan mampu mengidentifikasi kearah mana investasi harus dilakukan serta ke negara mana komoditas perdagangan mereka harus diperjualbelikan dengan melihat nilai keunggulan mereka secara komparatif.

Dalam teori keunggulan komparatif David Ricardo, dua negara akan melakukan perdagangan apabila perdagangan tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan pada kedua belah pihak dapat dilihat dari daya tukar domestik negara tersebut. Apabila suatu negara dapat menghasilkan suatu komoditas dengan harga yang sama dibandingkan dengan membeli dari negara lain maka perdagangan antar dua negara tidak akan terjadi. Lain halnya jika negara tersebut dapat membeli suatu komoditas dari negara lain lebih murah daripada memproduksi sendiri komoditas tersebut, maka perdagangan antar dua negara akan terjadi.

2.1.5 Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda antara negara satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 15 tahun, tanpa batas umur maksimum. Tenaga kerja (manpower) dibagi pula ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (laborforce) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk

angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia yang bekerja, atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan.

Selanjutnya, angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subsektor yaitu kelompok pekerja dan penganggur. Yang dimaksud pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan, dan memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Adapun yang dimaksud pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan masih mencari pekerjaan.

Ada perbedaan antara permintaan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang diminta atau dalam hal ini tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan atau suatu sektor. Permintaan tenaga kerja adalah keseluruhan hubungan antara berbagai tingkat upah dan jumlah orang yang diminta untuk dipekerjakan. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta lebih ditujukan kepada kuantitas atau banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu (Maryanti & Rinayanti, 2015).

Penduduk yang terserap, tersebar di berbagai sektor perekonomian. Sektor yang mempekerjakan banyak orang umumnya menghasilkan barang dan jasa yang relatif besar. Setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Demikian pula dengan kemampuan setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal. Pertama, terdapat perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor. Kedua,

secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya dalam pendapatan nasional

Jadi yang dimaksud dengan penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini adalah jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor perekonomian. Tenaga kerja di Indonesia lebih banyak terserap pada sektor informal. Sektor informal akan menjadi pilihan utama pencari kerja karena sektor formal sangat minim menyerap tenaga kerja. Sektor formal biasanya membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi.

2.2 Studi Empiris

Bagian ini berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan penelitian. Adapun penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

Lapong, Kindangen, dan Walewangko (2018) dalam penelitiannya menggunakan alat analisis *Location Quotient (LQ)* dan *Shift Share*. Hasil analisis *Location Quotient (LQ)* yaitu: Pertama, di Kota Manado terdapat sebelas sektor basis dan enam sektor non basis dari tujuh belas sektor ekonomi yang ada, sektor basis yang paling dominan di Kota Manado adalah sektor jasa. Kedua, Kota Bitung hanya terdapat tiga sektor basis dan sisanya empat belas sektor non basis dari tujuh belas sektor ekonomi yang ada, sektor basis yang paling dominan di Kota Bitung adalah sektor industri. Ketiga, di Kota Tomohon terdapat delapan sektor basis dan sembilan sektor non basis dari tujuh belas sektor ekonomi yang ada, sektor basis di Tomohon cukup beragam mulai dari sektor pertambangan hingga sektor jasa. Sedangkan yang terakhir, di Kota Kotamobagu terdapat sembilan sektor basis dan delapan sektor non basis dari tujuh belas sektor ekonomi yang ada, sektor basis di Kotamobagu lebih dominan

pada sektor jasa. Sedangkan hasil shift share keempat kota memiliki perekonomian yang tumbuh cepat, maju, Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon memiliki daya saing tinggi sedangkan Kota Kotamobagu memiliki daya saing yang rendah tetapi kinerja perekonomian daerah keempat kota unggul.

Sianturi dan Harahap (2020) dalam penelitiannya menggunakan alat analisis yaitu Analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share. Hasil penelitiannya Provinsi Sumatera Utara memiliki lima sektor unggulan dari tujuh belas sektor ekonomi yang ada yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan sektor real estate. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat dikembangkan dengan baik tentunya mempunyai kontribusi terbesar terhadap peningkatan pendapatan suatu daerah.

Sayuti dan Safitri (2020) dalam penelitiannya menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ) PDRB dan Tenaga Kerja. Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2014-2018 menunjukkan terdapat 10 (sepuluh) sektor unggulan/basis ($LQ > 1$) antara lain: Sektor Industri Pengolahan; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Konstruksi; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Sektor Real Estat; Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Jasa Lainnya; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Pendidikan. Sedangkan hasil analisis Location Quotient (LQ) yang ditinjau dari perbandingan porsi lapangan usaha utama, maka penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lombok Tengah yang memberikan peranan lebih tinggi atau nilai $LQ > 1$ yaitu

Sektor Pertanian dan Sektor Industri.

Pambudi, Nuraini, dan Arifin (2021) dalam penelitiannya menggunakan alat analisis Indeks Ketimpangan Williamson, *Analisis Static Location Quotient* (SLQ), dan *Dinamic Location Quotient* (DLQ). Hasil penelitian berdasarkan hasil perhitungan Indeks *Static Location Quotient* pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 sampai tahun 2020 yang menjadi sektor unggulan atau $SLQ > 1$ adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa Lainnya. Ketimpangan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2016-2020 setiap tahunnya mengalami peningkatan ketimpangan ekonomi. Hal tersebut terbukti dari hasil Indeks Williamson.

Rohmah (2021) dalam penelitiannya menggunakan alat *analisis Location Quotient* (LQ), *Dinamic Location Quotient* (DLQ), gabungan nilai SLQ dan DLQ, *Shift Share*, dan *Typologi Klassen*. Hasil penelitian menunjukkan Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dan Spesialisasi di Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2019, berdasarkan hasil analisis *Shift Share* adalah sektor : Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyedia Akomodasi Makan dan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya.

Raharjo, Ismiyati, dan Jaenuddin (2023) dalam penelitiannya menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ) yang terdiri dari *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) serta analisis

Shift Share (SS) yang terdiri dari *Regional Share*, *Proportional Shift*, dan *Differential Shift*. Hasil penelitian sektor ekonomi di Kabupaten Cilacap yang memiliki keunggulan komparatif berdasarkan analisis LQ adalah Pertambangan dan Penggalian. Terdapat empat sektor ekonomi di Kabupaten Cilacap yang memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan analisis *Shift Share*, yaitu: Pengadaan Listrik dan Gas, Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

2.3 Kerangka Pikir

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintahan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB digunakan untuk berbagai tujuan tetapi paling utama adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan.

PDRB dapat dianalisis untuk melihat sektor yang memiliki sektor basis dan non basis serta keunggulan komparatif di suatu wilayah. Adapun jenis alat analisis yang dapat digunakan untuk melihat hal tersebut ialah analisis *Location Quotient (LQ)* sektoral dan tenaga kerja. Dengan menggunakan alat analisis tersebut dapat diketahui sektor mana yang termasuk sektor basis dan non basis dalam sektoral dan penyerapan tenaga kerja serta sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Sehingga akhirnya akan menjadi acuan dalam arah pembuatan kebijakan perencanaan pembangunan.

Perekonomian di Provinsi Papua Barat terdiri dari sektor-sektor ekonomi

yang belum teridentifikasi sebagai sektor yang memiliki keunggulan komperatif. Maka dari itu peneliti ini ingin mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi Provinsi Papua Barat melalui analisis *Location Quotient (LQ)* untuk melihat sektor basis dan non basis terhadap sektoral dan tenaga kerja di Provinsi Papua Barat. Setelah diketahui keunggulan komperatifnya, maka pemerintah Provinsi Papua Barat diharapkan dapat mengetahui sektor ekonomi apa saja yang termasuk sektor unggulan dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

